

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu potensi wisata besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari berbagai bidang wisata alam, kebudayaan, dan buatan manusia. Peluang potensi pariwisata memberikan keuntungan dan berbagai prospek bagi kemajuan pembangunan nasional, melalui pemanfaatan objek wisata di berbagai daerah kepulauan yang mampu memberikan pendapatan devisa negara yang bersifat non-migas (Syahal, 2018).

Pendapatan daerah dapat diperoleh melalui adanya objek wisata yang potensial dan dapat dikembangkan sehingga menjadi sorotan utama atau *ikon* daerah yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Kerja sama dalam pengelolaan wisata sangat dibutuhkan , dengan pembentukan struktur kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah setempat untuk melakukan koordinasi membentuk dan menjaga objek wisata (G. R. Saputra et al., 2019).

Objek wisata adalah tempat yang mempunyai wilayah baik alami dan buatan manusia untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang ada, baik dari keindahan alam atau bukit, flora dan fauna, danau, pantai, situs, tari-tarian, dan beragam kebudayaan lainnya yang berkaitan erat dengan wisatawan yang sering melakukan kunjungan karena ciri dan keunikan destinasi wisata di daerah tersebut. Objek wisata yang memiliki kualitas yang baik dilihat dari berbagai penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, terdiri dari pelayanan, jasa,

aksesibilitas terhadap objek wisata yang harus saling berkaitan (S. C. Saputra, 2021).

Keberadaan objek wisata yang baik seharusnya didukung dengan adanya konsep 4A (*Attraction, Amenity, Accessibility, dan Ancillary*). *Attraction* atau daya tarik adalah sebuah pengertian untuk mendeskripsikan tempat wisata yang memiliki keunikan sehingga mampu menarik perhatian para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Konsep yang kedua adalah *amenity* atau fasilitas yang mendukung seluruh aktivitas yang berada di objek wisata seperti akomodasi, kebutuhan makan dan minum, tempat belanja, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga adalah aksesibilitas, untuk memudahkan para wisatawan dalam mengunjungi tempat wisata diperlukan seperti petunjuk arah, biaya wisata, akses perjalanan, dan lainnya. Konsep yang terakhir adalah lembaga pelayanan seperti lembaga kepariwisataan yang resmi agar memudahkan para wisatawan dalam menemukan layanan informasi, keamanan, dan lainnya (Yuliardi et al., 2021).

Salah satu objek wisata alam yang menarik adalah wisata alam di pantai. Menurut Kemenparekraf, wisata pantai merupakan salah satu tujuan para wisatawan karena keindahan destinasi alam yang memukau, spot selam, selancar, dan berbagai daerah di Indonesia dijadikan sebagai destinasi terpopuler. Pantai Nglambor yang terletak di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan aktivitas olahraga yang dapat dilakukan di laut lepas yakni *snorkeling*. Ombak yang tenang serta kejernihan air laut yang menampilkan keindahan dasar laut

dengan berbagai biota laut dan ikan yang berwarna-warni (Kemenparekraf, 2021).

Berdasarkan data dari *website* resmi Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul merupakan salah satu wilayah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Wonosari sebagai ibukotanya. Secara geografi luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.485.36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif memiliki 18 kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan. Topografi yang dimiliki beraneka ragam yang terdiri dari bukit, batu kapur atau kars, sungai bawah tanah dan berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut, seperti flora dan fauna, industri, dan pariwisata. Potensi wisata di Kabupaten Gunungkidul cukup beragam baik wisata alam berupa panatai, goa, bukit, air terjun, tempat bersejarah, pegunungan, serta wisata budaya dan wisata religi (Pemkab Gunungkidul, 2024).

Bidang pariwisata yang dapat dijadikan destinasi unggul adalah adanya garis panjang pantai yang membentang sekitar 65 km dari Kecamatan Purwosari samapi Kecamatan Girisubo. Salah satunya adalah Pantai Ngalmbor, merupakan salah satu wisata yang terkenal dan terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Keindahan yang ditawarkan adalah pemandangan pantai dan sekelilingnya yang indah serta adanya tempat untuk melakukan kegiatan berenang serta menyelam yakni spot *snorkeling*. Para wisatawan dapat merasakan sensasi menyelam di air dengan berbagai pemandangan ikan dan terumbu karang yang indah serta dapat melakukan dokumentasi dengan spot foto

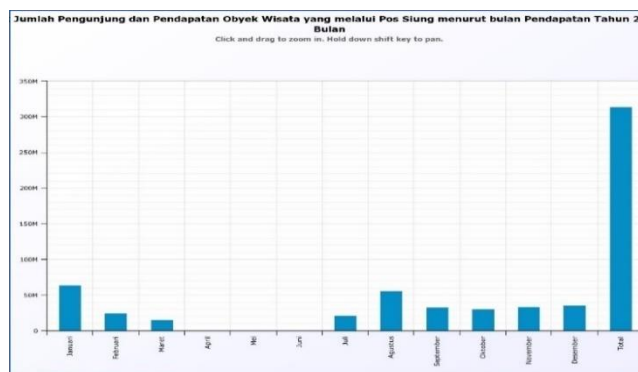
untuk melihat bawah laut yang indah. Selain melihat pemandangan yang indah di dasar laut, Pantai Nglambor juga memiliki jembatan gantung yang menghubungkan kedua tebing dengan pemandangan pantai disekitarnya (wisatagk, 2020).

Menurut Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata sesuai dengan Bab II Pasal 4 poin d yang menjelaskan tentang pentingnya memelihara kelestarian alam dan perlindungan di lingkungan setempat. Terkait peraturan daerah tersebut, pariwisata di Kabupaten Gunungkidul harus melestarikan dan merawat destinasi pariwisata dengan baik, untuk memberdayakan serta membangun daya tarik wisatawan. Pelestarian ini dapat berupa alam lingkungan, kesenian, dan berbagai daya dukung pelestarian lainnya (Gunungkidul, 2014).

Pantai Nglambor merupakan salah satu pantai yang memiliki objek wisata unik dan keindahan ekosistem yang ada di tempat tersebut. Biota ikan, terumbu karang, dan lainnya menambah nilai daya tarik wisata dibandingkan dengan pantai lainnya yang terletak di Kabupaten Gunungkidul. Keunikan yang dimiliki Pantai Nglambor, memberikan dampak positif kepada para masyarakat setempat dalam pendapatan ekonomi karena banyaknya pengunjung yang datang. Menurut data pada tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wisatawan domestik dan mancanegara melalui Pos Siung mencapai 69.820 jiwa. Hal ini dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang baik terhadap perekonomian masyarakat sekitar objek wisata dan meningkatkan daya tarik wisatawan lainnya untuk berkunjung dan mempromosikan objek

wisata secara sukarela. Promosi yang diberikan dan ditunjukkan langsung oleh para wisatawan akan memberikan dampak yang jauh lebih baik untuk menarik wisatawan lainnya, karena mereka akan menyakini terkait postingan yang diunggah oleh para wisatawan yang berkunjung di destinasi tersebut (wisatagk, 2020).

Gambar 1. 1 Data Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Tahun 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2020

Data di atas menunjukkan kunjungan wisatawan melalui Pos Siung yang merupakan tempat retribusi, memberikan akses untuk menuju ke berbagai pantai salah satunya adalah Pantai Nglambor. Nglambor merupakan salah satu destinasi yang memiliki spot menarik sehingga memberikan keunggulan dan daya tarik lebih kuat dibandingkan dengan pantai lainnya. Hal yang menarik dari keindahan yang tidak ditemukan di objek wisata pantai yang lain adalah adanya *snorkeling* di laut yang lepas.

Melakukan aktivitas *snorkeling* di Nglambor merupakan hal yang banyak diminati oleh para wisatawan, karena mereka akan melihat dengan jelas keindahan dasar laut yang menawan. Akan tetapi, banyaknya wisatawan yang mengunjungi Pantai Nglambor membuat ekosistem dan biota laut yang ada di

Ngambor menjadi rusak. Kerusakan yang terjadi ialah dengan berubahnya ekosistem terumbu karang yang seharusnya di lestarikan untuk menikmati keindahan laut dan memberikan rumah bagi ikan dan biota laut lainnya. Kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, sehingga membuat wisatawan tidak tertarik lagi melakukan *snorkeling* di Pantai Nglambor dan menjadikan pantai tersebut sepi pengunjung dan memberikan dampak negatif pada pendapatan perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan sinergi dalam mengelola dan menjaga kawasan objek wisata agar keindahan dan keunikannya tetap terjaga secara maksimal, sehingga mampu memberikan berbagai dampak yang positif untuk seluruh kalangan yang terlibat. Dalam upaya pengoptimalan potensi wisata agar daya tarik wisatawan kembali meningkat, maka peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Optimalisasi Pengelolaan Objek Pariwisata Pantai Nglambor Kabupaten Gunungkidul.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada latar belakang di atas, terdapat masalah yang muncul dan berkaitan dengan peran pemerintah serta masyarakat pengelola objek wisata di Pantai Nglambor dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kawasan Pantai Nglambor. Dari uraian tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan objek pariwisata di Pantai Nglambor Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa saja kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi potensi pariwisata melalui kolaborasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Menjelaskan kolaborasi Pemerintah dan masyarakat setempat dalam optimalisasi pengelolaan objek wisata alam di Pantai Nglambor.
2. Menjelaskan kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi potensi pariwisata melalui kolaborasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan keilmuan. Mampu menambah ilmu pengetahuan tentang potensi objek wisata dan mengetahui peran para pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat lokal dalam mengelola potensi pariwisata, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pesisir pantai selatan dalam mempertahankan

eksistensi objek wisata alam guna mengelola dan merawat tempat wisata agar mampu mempertahankan pendapatan perekonomian masyarakat di sekitar pantai.

- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai tata kelola kolaborasi dalam mengoptimalkan potensi pariwisata.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk mengubah cara berpikir dan perilaku pelaku wisata agar mampu menjaga wisata alam agar tetap lestari dengan berbagai keindahan dan keunikan dari kawasan pantai tersebut.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan, kontribusi, dan solusi mengenai kerusakan objek wisata sehingga diperlukan regulasi lebih mengikat agar seluruh kalangan yang bersangkutan mendapatkan dampak positif dari pengembangan potensi kawasan destinasi wisata.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) literatur yang sudah membahas mengenai tata kelola kolaborasi dalam optimalisasi pariwisata, yakni :

Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang tentunya berpotensi pada bidang pariwisata yang menjadikan sumber kebutuhan hidup dan kekayaan maritim Indonesia yang besar, sehingga mampu dijadikan sebagai tempat bekerja masyarakat. Diperlukan pengembangan wisata bahari yang secara maksimal dalam mengedepankan sarana dan prasarana untuk menarik



wisatawan. Sumberdaya alam yang melimpah harus dibarengi dengan upaya dalam mengelola kekayaan alam bagi kebermanfaatannya bersama. Ketertinggalan pengembangan sumberdaya dapat mengupayakan pengembangan yang komprehensif seperti meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sistem yang ada di kawasan pariwisata tersebut (Riska et al., 2020).

Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah proses yang akan menciptakan keuntungan bagi para aktor yang terlibat baik dari pembuat kebijakan maupun publik. Kolaborasi ini hadir dalam memberikan kepercayaan antara stakeholder dan para pemangku kepentingan, dengan menciptakan sifat saling bekerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik. *Collaborative government* merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam pembangunan yang membutuhkan kolaborasi dalam menyikapi berbagai masalah publik. Pentingnya berbagai pihak yang terlibat dalam mengelola permasalahan yang menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus sehingga mampu memberikan keputusan yang saling menguntungkan dan adil bagi para aktor yang terlibat dalam *collaborative government* (Putra et al., 2020).

Konsep *collaborative government* merupakan salah satu konsep yang menekankan pada prinsip kerjasama dalam menjelaskan berbagai fenomena kolaborasi dalam penyelenggaraan antara pemerintah dan pelayanan publik. Kerjasama antara aktor publik dan swasta akan menciptakan produk hukum berupa kebijakan atau regulasi yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kolaborasi memungkinkan adanya kekuasaan dan pemaksaan, salah satu pihak dapat mempengaruhi dan memaksa

keputusan dari pihak lain yang memiliki pendapat atau keputusan yang berbeda. Komitmen dan rencana terkait persiapan untuk menyelaraskan kegiatan, hal ini dibutuhkan komitmen dan motivasi individu terhadap kegiatan, keputusan, dan tujuan strategis organisasi meskipun terkadang tidak selalu konsisten dan bersebrangan keputusan (D. Saputra, 2020).

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan perubahan terhadap pendapatan negara, melalui kebijakan yang didasarkan pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, dan media massa. Pariwisata harus dibentuk dengan menggunakan konsep pariwisata keberlanjutan (*sustainable tourism*) dengan menekankan pada pengembangan potensi pariwisata daerah, sehingga memberikan dampak positif dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dibutuhkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan wisatawan berkunjung, selain itu dibutuhkan promosi secara aktif melalui media sosial. Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk masyarakat lokal harus diberikan agar menjadi lebih terampil dan peduli terhadap konservasi lingkungan dan budaya yang ada di daerah setempat (Lekatompessy et al., 2023).

Peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan untuk membangun kawasan pariwisata yang dirancang sesuai dengan tujuan dan rencana awal. Studi kasus dalam jurnal ini adalah Kebon Raya Cibinong yang mengelompokkan dua *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder dalam menganalisis peran berdasarkan kepentingan dan pengaruh dalam mengemembangkan pariwisata tersebut. Pembagian peran dan tanggung jawab

terhadap masing-masing stakeholder memberikan dampak yang baik, yakni mereka mampu mempercepat proses pembangunan yang cukup terlihat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga lebih memperhatikan kepada lingkungan setempat dengan menjaga kebersihan yang mampu memberikan kesan positif bagi pengembangan kawasan sekitar (Berliandaldo et al., 2021).

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam upaya peningkatan potensi pariwisata di daerah dengan membentuk jaringan struktur yang membantu mewujudkan rencana yang akan diimplementasikan. Pada jurnal ini membahas tentang cara dinas pariwisata dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Sula, dimana terdapat pembagian dimensi struktur pemerintah guna untuk mengevaluasi struktur mana yang paling baik untuk digunakan mengelola kepariwisataan di Kabupaten Sula. Struktur dimensi tersebut terdiri dari; dimensi *networked structure*, dimensi *commitment to a common purpose*, dimensi *trust among the participant*, dimensi *governance*, dimensi *access to authority*, dan dimensi *access to resources*. Masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini memiliki peran dan tugas yang dijalankan secara kolaboratif, akan tetapi sumberdaya manusia dan teknis perbaikan terkait infrastruktur masih belum optimal terutama dinas pariwisata yang masih lemah dalam implementasi anggaran yang tepat sasaran (Silayar et al., 2021).

Pariwisata kontemporer memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan ditandai adanya kolaborasi antara aktor otoritas lokal, lembaga

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal. Kolaborasi yang dibentuk akan mengakibatkan keberhasilan dalam perencanaan pembangunan pariwisata. Terdapat beberapa definisi tata kelola kolaboratif sebagai struktur pengambilan keputusan dan kebijakan publik dengan memilih beberapa bagian metode, baik melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, proses mencapai komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Pengelolaan yang dibangun dengan melibatkan sinergitas kolaborasi yang baik, sehingga menciptakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha wisata sehingga pemerintah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pariwisata tersebut (Sudirman et al., 2022).

Tata kelola kolaboratif dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi beberapa indikator atau proses, seperti dalam Ansell dan Gash :2007 yang mengatakan terdapat model tata kelola kolaboratif yang harus dilakukan untuk mencapai kolaboratif yang efektif. Proses kolaboratif tersebut adalah *face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes*.

Potensi sumberdaya merupakan salah satu variabel yang penting dalam menentukan studi kasus untuk kesesuaian kegiatan pada kawasan pesisir terutama kawasan pantai. Memahami kesesuaian pada objek agar memiliki dampak yang positif atau berkebalikan dan berdampak negatif dan merusak lingkungan setempat. Terdapat parameter dalam memahami kesesuaian kawasan objek wisata terkhusus pantai yakni tipe pantai, lebar, material dasar perairan, biota, dan ketersediaan air tawar. Hal ini dilakukan untuk pengembangan

kawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan sehingga tujuan wisata menjadi selaras (Manurung et al., 2022).

Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan kemampuan bagi para masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun pada objek destinasi wisata tersebut. Berbagai hambatan dan tantangan menjadi salah satu upaya yang harus diselesaikan dan mencari sebuah solusi dalam mengukur dan menganalisa peluang. Pada pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan terobosan yang maju dan banyak diminati oleh para kalangan. Membuat dan menggunakan aplikasi merupakan salah satu strategi dalam mempromosikan destinasi wisata dan pelaku usaha. Selain itu, apabila aplikasi yang digunakan telah disosialisasikan dengan baik, maka akan sangat membantu para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat tersebut dengan mudah dan terjangkau (Manafe et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian berbagai biota laut seperti terumbu karang, seperti dalam jurnal ini bahwa kelestarian lingkungan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengetahui seberapa mereka mengetahui terkait pengembangan pelestarian terumbu karang. Dengan mengetahui indikator tersebut, masyarakat mampu berpartisipasi mendukung pemerintah dalam menjaga lingkungan dengan menerapkan konservasi laut dan mencegah serta melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ini, apabila terdapat oknum yang merusak konservasi (Zalmita et al., 2020).

Tabel 1. 1 : Analisis Taksonomi Literature Review

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Riska, Fitria Ramadani, Ratih Purwasih (2020).	Analisis Pengembangan Wisata Bahari Pantai Apparallang di Bulukumba, (Sensistek :Riset Sains dan Teknologi Kelautan)	Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang berpotensi pada bidang pariwisata. Ketertinggalan pengembangan sumberdaya dapat mengupayakan pengembangan yang komperhensif seperti meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sistem yang ada di kawasan pariwisata
2	Eka Putra, Nova Elsyra, Muchamad Zaenuri (2020).	Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta : Studi Kasus Program “Gandeng-Gendong”. (Jurnla Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram).	<i>Collaborative government</i> merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam pembangunan yang membutuhkan kolaborasi dalam menyikapi berbagai masalah publik. Pentingnya berbagai pihak yang terlibat dalam mengelola permasalahan yang menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus sehingga mampu memberikan keputusan yang saling menguntungkan dan adil bagi para aktor yang terlibat dalam <i>collaborative government</i>
3	Deden Saputra (2020).	Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. ( <i>Government</i> : Jurnal Ilmu Pemerintahan)	Kolaborasi memungkinkan adanya kekuasaan dan pemaksaan, salah satu pihak dapat mempengaruhi dan memaksa keputusan dari pihak lain yang memiliki pendapat atau keputusan yang berbeda. Komitmen dan rencana terkait persiapan untuk menyelaraskan kegiatan, hal ini dibutuhkan komitmen dan motivasi individu terhadap kegiatan, keputusan, dan tujuan strategis organisasi harus sesuai dengan keputusan bersama.
4	Ransta L. Lekatompessy, Edoardus E. Maturbongs, Fiqih, Puspita Wulan Sari (2023)	Formulasi Kebijakan Kolaborasi Pengelolaan Pariwisata (SIJAS :Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosiologi).	Pariwisata harus dibentuk dengan menggunakan konsep pariwisata keberlanjutan ( <i>sustainable tourism</i> ) dengan menekankan pada pengembangan potensi pariwisata daerah, sehingga memberikan dampak positif dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk masyarakat lokal harus diberikan agar menjadi lebih terampil dan peduli

No	Penulis	Judul	Hasil
			terhadap konservasi lingkungan dan budaya yang ada di daerah setempat.
5	Mahardhika Berliandaldo, Achmad Chodiq, Driszal Fryantoni (2021)	Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata di Kebun Raya Cibinong (INOBIIS : Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia).	Dalam mengemembangkan pariwisata tersebut. Pembagian peran dan tanggung jawab terhadap masing-masing stakeholder memberikan dampak yang baik, yakni mereka mampu mempecepat proses pembangunan yang cukup terlihat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga lebih memperhatikan kepada lingkungan setempat dengan menjaga kebersihan yang mampu memberikan kesan positif bagi pengembangan kawasan sekitar sehingga pariwisata bisa berkembang.
6	Kedasi Silayar, Ika Sartika, Deti Mulyati (2021).	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula (Jurnal Renaissance).	Terdapat pembagian dimensi struktur pemerintah guna untuk mengevaluasi struktur mana yang paling baik untuk digunakan mengelola kepariwisataan di Kabupaten Sula. Struktur dimensi tersebut terdiri dari; dimensi <i>networked structure</i> , dimensi <i>commitment to a common purpose</i> , dimensi <i>trust among the participant</i> , dimensi <i>governance</i> , dimensi <i>access to authority</i> , dan dimensi <i>access to resources</i> . Masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini memiliki peran dan tugas yang dijalankan secara kolaboratif, akan tetapi sumberdaya manusia dan teknis perbaikan terkait infrastruktur masih belum optimal terutama dinas pariwisata yang masih lemah dalam implemntasi anggaran yang tepat sasaran
7	Faturachman Alputra Sudirman, Irma Tri Annisya Tombora, La Tarifu (2022).	Tata Kelola Kolaboratif ( <i>Collaborative Governance</i> ) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi (Indonesian Journal of Internasional	Pariwisata kontemporer memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan ditandai adanya kolaborasi antara aktor otoritas lokal, lembaga pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal. Kolaborasi yang dibentuk akan mengakibatkan keberhasilan dalam perencanaan pembangunan pariwisata, baik melalui dialog tatap muka,

		<i>Relations</i> ).	membangun kepercayaan, proses mencapai komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Pengelolaan yang dibangun dengan melibatkan sinergitas kolaborasi yang baik, sehingga menciptakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha wisata.
No	Penulis	Judul	Hasil
8	Wenny Aberti Manurung, I Wayan Restu, Gde Raka Angga Kartika (2022).	Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Pantai Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (Bumi Lestari <i>Journal of Environment</i> ).	Memahami kesesuaian pada objek agar memiliki dampak yang positif atau berkebalikan dan berdampak negatif dan merusak lingkungan setempat. Terdapat parameter dalam memahami kesesuaian kawasan objek wisata terkhusus pantai yakni tipe pantai, lebar, material dasar perairan, biota, dan ketersediaan air tawar. Hal ini dilakukan untuk pengembangan kawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan sehingga tujuan wisata menjadi selaras.
9	Mesri Welhelmina Nisriani Manafe, Herny Constantia Franggidae, Eka Merdekawati Imelda Seseli, Frits Oscar Fanggidae (2023).	Pemanfaatan <i>Mobile Application</i> Si-Apik bagi Perempuan Pesisir Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Maritim. ( <i>Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement</i> ).	Diperlukan terobosan yang maju dan banyak diminati oleh para kalangan. Salah satunya yaitu dengan membuat serta menggunakan aplikasi merupakan salah satu strategi dalam mempromosikan destinasi wisata dan pelaku usaha. Selain itu, apabila aplikasi yang digunakan telah disosialisasikan dengan baik, maka akan sangat membantu para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat tersebut dengan mudah dan terjangkau.
10	Novia Zalmita, M. Hafizul Furqan, Zul Usrati (2020).	Partisipasi Masyarakat Gampong Tgk Dilaweung Terhadap Pelestarian Terumbu Karang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. (Jurnal Samudra Geografi).	Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian berbagai biota laut seperti terumbu karang, seperti dalam jurnal ini bahwa kelestarian lingkungan. Dengan mengetahui indikator terkait pelestarian, masyarakat mampu berpartisipasi mendukung pemerintah dalam menjaga lingkungan dengan menerapkan konservasi laut dan mencegah serta melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ini, apabila terdapat oknum yang merusak konservasi.



Dilihat dari literatur yang membahas mengenai tata kelola kolaborasi pada bidang pariwisata, penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pengembangan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kolaborasi dibutuhkan dalam berbagai permasalahan dalam upaya menghadirkan hal yang baru dan memberikan dampak yang baik bagi seluruh pihak yang ada didalamnya. Kolaborasi dalam pariwisata harus digencarkan untuk mengembangkan potensi wisata diberbagai daerah, dengan demikian masyarakat juga mampu merasakan adanya kolaborasi apabila dilakukan secara maksimal.

Penelitian saya mengambil objek wisata di Pantai Nglambor yang terletak di Desa Purwodadi, Kabupaten Gunungkidul. Pantai ini memiliki keunikan yang tidak ditemukan di sepanjang pantai Gunungkidul, keunikan pantai ini terletak pada adanya spot *snorkeling* di lautan lepas dan dengan berbagai biota laut serta terumbu karang yang ada, akan tetapi objek wisata ini mengalami penurunan pengunjung sehingga memberikan permasalahan yang cukup dinamis untuk diteliti. Pada penelitian ini saya ingin mengetahui terkait tata kolaboratif yang dijalankan oleh pemerintahan di daerah Pantai Nglambor, apabila dilihat dari penelitian di atas belum ada yang membahas terkait upaya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam meregenerasi sektor pariwisata yang redup. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Tata Kelola Kolaboratif**

Menurut (Muslih et al., 2019) tata kelola secara konseptual adalah meningkatkan kinerja dalam bentuk finansial dan non finansial. Adanya hubungan positif antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, yang mampu memberikan pengaruh implementasi konsep *good governance*. Sedangkan tata kelola pemerintahan adalah proses dan struktur tata kelola yang terdapat instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik yang baik. Komitmen yang mendorong dalam meningkatkan pencapaian dan tujuan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tata kelola memberikan kombinasi hubungan yang berintensitas tinggi dengan transformasi yang bersifat kolaboratif. Visi dan misi diantara pengelola harus sama, selain itu partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder* harus tetap terjaga dan terjalin secara kuat agar mampu mencapai kesepakatan untuk berbagai sumberdaya. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta sesuai dengan kemampuan dan karakteristik organisasi, sehingga nantinya mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik (Atmojo et al., 2020).

Menurut (Riodini, 2023) mengatakan bahwa tata kelola kolaboratif adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dikatakan secara filosofis bahwa keterbatasan manusia secara individual dalam mengatasi permasalahan kehidupannya, sehingga tidak dapat selamanya diatasi sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain, dengan demikian manusia

membentuk kelompok, komunitas, dan organisasi. Kolaborasi adalah metode dalam pemecahan masalah dalam mengupayakan tujuan bersama beserta sumberdaya yang ada dengan meningkatkan etos kerja, baik dalam menjalin hubungan kebersamaan antar anggota organisasi. Pengertian kolaborasi juga dapat diartikan sebagai inti transformasi organisasi, yang semakin banyak partisipasi maka akan semakin besar kepercayaan, kreativitas, dan produktivitas. Dengan demikian kolaborasi dapat dikatakan sebagai keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi dalam memecahkan masalah bersama-sama dengan hasil tujuan yang sama.

### **1.1 Proses Kolaborasi**

Menurut (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan terdapat enam proses yang terjadi di dalam kolaborasi yakni penentuan masalah, penentuan tujuan, dan implementasi. Tahapan-tahapan tersebut mampu menentukan tahapan kolaborasi sebagai berikut :

- a. Dialog tatap muka (*face to face*), kegiatan bertemunya para aktor yang terlibat untuk melakukan eksplorasi keuntungan dan pertemuan ini dilakukan tidak hanya pada awal saja tetapi berkelanjutan.
- b. Membangun kepercayaan (*trust building*), tata kelola dalam pariwisata harus tertanam adanya kepercayaan diantara para aktor yang terlibat. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari adanya transparansi, kejelasan, dan keadilan yang nyata sehingga mampu membangun rasa untuk saling percaya. Kepercayaan yang dibangun dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik.

- c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*), dalam tahapan ini, para aktor harus bersama-sama untuk sepakat dalam melakukan proses untuk tujuan bersama yang diinginkan. Seluruh aktor yang bersangkutan harus bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, aktif dalam berbagai proses untuk perkembangan selanjutnya.
- d. Pemahaman bersama (*share understanding*), pada tahapan ini menekankan terkait pemahaman atas peran serta tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Diperlukan pemahaman bersama untuk menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan agar tujuan bersama dapat dicapai.
- e. Hasil menengah (*intermediate outcomes*) merupakan kolaborasi yang terjadi apabila tujuan dan manfaat lebih konkrit dengan kemenangan kecil. Hasil dari proses merupakan hal yang terpenting dalam membangun momen dan menghasilkan kolaborasi yang sukses.

## **1.2 Manfaat Berkolaborasi**

Kolaborasi merupakan salah satu aspek yang penting untuk dilakukan oleh para kolaborator yang terlibat sehingga akan memiliki beberapa manfaat dan keuntungan dalam menjalankan kolaboratif dalam sebuah organisasi (Choirul, 2020) dengan demikian, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. *Pooling of talent and strengths*, adanya kolaborasi sangat membantu dan bermanfaat dalam menghimpun kekuatan dan bakat dari berbagai anggota organisasi. Mampu menciptakan efektivitas dalam penyelenggaraan

kolaborasi melalui menyaksikan, mengambil manfaat, dan menimplementasikannya dengan optimal. Dengan demikian anggota organisasi dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas diri atas capaian yang lebih cepat dan baik.

- b. *Development of employee skills*, kolaborasi dalam organisasi memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka yang terlibat dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya melalui interaksi, pertukaran ide, dan berbagi pengalaman sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih baik serta memberikan cara berpikir lebih konstruktif.
- c. *Speeds up solution*, kolaborasi dapat memfasilitasi penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien, kerja sama yang baik dapat mempercepat proses kerja. Misalnya, suatu masalah dikelola oleh satu pihak tentunya akan memerlukan jangka waktu yang lebih lama. Apabila dengan kolaborasi maka akan ada berbagai pihak yang ahli dalam permasalahan tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

### **1.3 Peran Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat**

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara (Pujiyono, 2022).

Peran kolaborasi ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1. Pemerintah:

Aktor utama dalam tata kelola kolaboratif, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengoordinasikan upaya bersama. Terkadang, masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara tingkatan pemerintahan, seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini bisa mengakibatkan tumpang tindihnya permintaan data dan informasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan:

- a. Meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut.
- b. Mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program.
- c. Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah.
- d. Program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Sharing risk, dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- f. Sharing dana, sehingga ketergantungan pada APBD berkurang.
- g. Merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government.

## 2. Masyarakat:

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program adalah kunci dari kolaborative governance yang sukses. Namun, masyarakat sering kali kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu yang sedang dibahas atau kurangnya akses terhadap informasi yang relevan. Pemerintah dan sektor swasta perlu berperan dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat.

- a. Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan: Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dengan mengadakan dialog, konsultasi publik, atau forum partisipatif. Pendapat dan masukan dari masyarakat bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.
- b. Pelaksanaan Program-Program Sosial: Pemerintah sering kali bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau komunitas masyarakat dalam melaksanakan program-program sosial seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah untuk mencapai lebih banyak orang dan memastikan program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal.
- c. Pengelolaan Sumber Daya: Dalam pengelolaan lingkungan hidup, misalnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat lokal atau kelompok-kelompok lingkungan untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Kolaborasi semacam ini

memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik dan penanganan masalah secara lebih efektif.

- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, atau akses terhadap pasar bisa didukung oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.
- e. Penanganan Bencana Alam: Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam penanganan bencana alam. Masyarakat bisa dilibatkan dalam proses mitigasi risiko, persiapan menghadapi bencana, dan juga dalam proses pemulihan pasca-bencana.
- f. Pengawasan Terhadap Pemerintah: Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitasnya. Organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menghindari korupsi.

Kolaborasi yang dibangun berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menilai sejauh mana pembangunan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatannya berpartisipasi dalam pembangunan.



Namun diakui bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) konflik kepentingan yang dapat menimbulkan perbedaan antara tujuan program dan tujuan masyarakat/swasta, (2) faktor-faktor internal seperti tingkat pendidikan dan keterampilan, status sosial, dan jumlah tanggungan keluarga, (3) faktor-faktor eksternal seperti pengaruh penguasa setempat dan insentif dari lembaga luar wilayah. Kebijakan kolaborasi saat ini hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur.

**a. Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata**

Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan salah satunya adalah masyarakat. Dalam tata kelola pariwisata, masyarakat adalah salah satu pihak yang paling berperan penting dalam pengembangan di daerahnya. Melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) mampu memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pariwisata. Pendekatan CBT merupakan konsep yang paling bisa diterapkan di daerah, karena masyarakat merasa memiliki destinasi wisata yang berada di daerah tersebut dan memberikan dampak positif yaitu dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata (Sumarto & Dwiantara, 2019).

Pariwisata memerlukan kepentingan multiaktor, multisektor, dan *multistakeholder* dengan demikian diperlukan tata kelola kolaboratif untuk mewujudkan tujuan bersama dalam mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Adanya *collaborative governance* mendorong berkembangnya pariwisata dan mengetahui faktor-faktor

pendukung dan penghambat berkembangnya destinasi pariwisata melalui tata kelola kolaborasi (Patadjenu et al., 2023).

Akselerasi pariwisata dapat berkembang secara sistematis melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pariwisata. Keterlibatan berbagai aktor termasuk masyarakat adalah hal yang esensial dan utama, pariwisata yang berkembang dengan baik tentunya menerapkan konsep yang bisa terealisasi secara holistik dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mampu merealisasikan pengembangan pariwisata secara optimal (Kusen et al., 2023).

Terdapat tiga unsur penting untuk mengkonstruksi terkait kolaborasi dalam pariwisata yaitu adanya objek wisata, aktivitas yang berkaitan dengan wisata, dan keterlibatan berbagai aktor. Kolaborasi yang efektif dan adil akan menghasilkan pariwisata yang sistematis serta berkelanjutan, dilakukan melalui aksi konkrit para pihak yang terlibat berupa kemampuan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menitik beratkan keberlanjutan salah satunya adalah kelestarian dan mutu lingkungan hidup, hal ini sejalan dengan konsep *sustainable tourism* (Pujiyono, 2022).

Menurut Ansell and Gash tata kelola kolaboratif memiliki empat dimensi dalam rujukan sebuah tercapainya *collaborative governance* yakni adanya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Kondisi awal adalah pemicu timbulnya berbagai pihak yang ingin terlihat melakukan kolaborasi baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Desain kelembagaan merupakan kejelasan prosedur dan aturan yang harus

dijalankan secara adil, transparan, dan terbuka. Langkah ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi keberhasilan dalam lembaga yang nantinya akan mencapai tujuan bersama dengan cara *consensus*. Terakhir adalah proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear (Molla et al., 2021).

## **2. Optimalisasi Potensi Pariwisata**

Optimalisasi merupakan upaya seseorang dalam meningkatkan kegiatan agar mampu memperkecil kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Selain itu optimalisasi juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan untuk meningkatkan sesuatu untuk menjadi sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif dalam mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan sebaik-baiknya (Heckman et al., 2020).

Optimalisasi potensi dalam pariwisata harus menekankan pada prespektif sumberdaya manusia, dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, peningkatan keterampilan, menciptakan produk yang kreatif dan inovatif, dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan terbaik, maka hal tersebut akan berdampak pada pengoptimalan sumberdaya alam dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Tujuan dari optimalisasi adalah memberikan rasa sadar kepada masyarakat lokal terhadap potensi yang sudah ada (Ogi et al., 2022).

Salah satu cara dalam mengoptimalkan potensi pariwisata di daerah adalah dengan adanya dukungan infrastruktur yang mempermudah aksesibilitas yang lebih cepat secara berkelanjutan. Kolaborasi diperlukan dalam optimalisasi

potensi pariwisata, seperti pemberian pelayanan yang optimal melalui pokdarwis ataupun karang taruna di wilayah tersebut. Penting dalam memperhatikan keseimbangan sumberdaya alam, sumberdaya sosial, kearifan lokal, budaya, dan perekonomian demi menjaga pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) (Rona et al., 2022).

Kehidupan manusia yang bergantung dengan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar secara fundamental, hal ini yang menyebabkan harus melakukan optimalisasi dalam penggunaan sumberdaya dengan melestarikan dan berkonsisten mewujudkan keberlanjutan dengan melalui tindakan pemeliharaan pada titik keseimbangan yang normal. Pembangunan pariwisata harus mampu menggunakan sumberdaya dengan semaksimal mungkin dan menghindari penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Kualitas masyarakat yang berkualitas akan mempengaruhi perkembangan potensi wisata di suatu daerah secara optimal (Lestanata & Zitri, 2020).

Optimalisasi pengembangan wisata perlu melakukan inovasi dan dorongan melalui kreatifitas guna menghasilkan berbagai macam produk khas daerah tersebut, dengan demikian wisatawan yang datang akan tertarik membeli hasil dari kreatifitas barang yang unik dan tidak ditemui di tempat yang lainnya. Melibatkan berbagai kalangan dalam bekerja sama mengoptimalkan potensi yang ada, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam upaya menerapkan pariwisata yang unggul (Sidiq et al., 2023).

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur yang penting dalam penelitian untuk menjelaskan definisi atau gambaran secara lebih jelas tentang pembatasan definisi konsep satu dengan yang lainnya. Definisi konseptual yang akan digunakan adalah :

1. Tata Kelola Kolaboratif adalah kebutuhan intrinsik manusia untuk bekerja sama dalam mengatasi keterbatasan individual dalam menyelesaikan permasalahan melalui kebersamaan dan membentuk kolaborasi dalam upaya terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama.
2. Optimalisasi potensi pariwisata adalah upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam meningkatkan kualitas sumberdaya alam dengan mengembangkan potensi alam semaksimal mungkin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

## **H. Definisi Operasional**

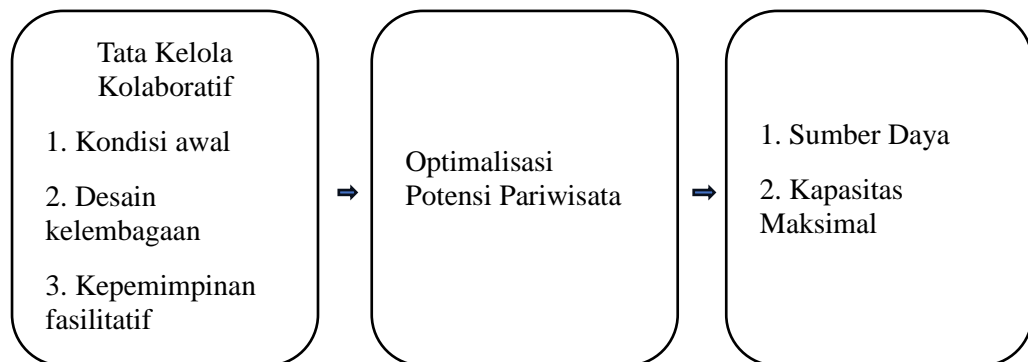
Definisi operasional adalah cara mengukur atau mengidentifikasi suatu variable dalam penelitian. Definisi operasional yang dimaksud adalah batasan dari suatu variabel yang abstrak menjadi lebih dapat diukur dengan konsisten dan objektif. Penelitian ini berfokus pada tata kelola kolaboratif dalam optimalisasi potensi pariwisata. Berikut merupakan beberapa indikator dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Tata kelola kolaboratif	Kondisi awal	1. Kepercayaan 2. Masalah konflik 3. Modal sosial
		Desain kelembagaan	1. Kejelasan aturan dan prosedur 2. Peraturan harus secara adil, transparan, dan terbuka
		Kepemimpinan fasilitatif	1. Pemimpin fasilitatif 2. Membangun rasa percaya 3. Tujuan bersama
		Proses kolaborasi	1. <i>Face to face dialogue</i> 2. Membangun kepercayaan, 3. Membangun komitmen, 4. Berbagi pemahaman, dan 5. Hasil sementara.
2	Optimalisasi Potensi Pariwisata	Sumberdaya	1. Peran Pemerintah dalam Mengelola Lingkungan 2. Peran Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan
		Kapasitas maksimal	1. Melakukan FGD 2. Monitoring dan evaluasi

## I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini membutuhkan alur penelitian dengan rumusan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Untuk mempermudah hal tersebut, maka berikut bagan alurnya:



## J. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena atau masalah yang terkait manusia dan sosial, yang berusaha untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap pengaruh kehidupan mereka. Penelitian ini mendapatkan data melalui proses pengumpulan data, analisis, dan diinterpretasikan (Fadli, 2021). Peneliti mengambil metode ini karena dalam mencari data, memerlukan interaksi langsung antara narasumber dan peneliti.

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil oleh peneliti adalah di Pantai Nglambor yang berlokasi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.

## **2. Jenis Data**

Penelitian ini membutuhkan sumber data dari berbagai sumber informasi data untuk menunjang keberhasilan penelitian. Dalam memperoleh data dan informasi yang tepat dalam penelitian terkait “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Optimalisasi Pengelolaan Objek Pariwisata Pantai Nglambor Kabupaten Gunungkidul”, menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan berbagai fakta dan informasi yang berhubungan mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari perseorangan atau individu yang secara langsung tanpa melalui perantara serta dilakukan melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Yuniati, 2021). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Desa Purwodadi dan masyarakat setempat di Pantai Nglambor. Narasumber dalam wawancara penelitian adalah Lurah Purwodadi, Pengurus Pokdarwis Nglambor Lestari, dan masyarakat sekitar.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain dalam bentuk tabel atau diagram-diagram



(Husein Umar 2013: 42). Dalam penelitian ini data untuk mendukung peneliti menemukan sumber informasi yaitu melalui data-data yang berada di Dinas Pariwisata Gunungkidul dan Badan Pusat Statistika.

Tabel 1. 3 Data Sekunder

No	Jenis Data	Sumber
1	Profil Pantai Nglambor	<i>Webside</i> Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul
2	Struktur kelembagaan Pemerintah Desa Purwodadi	Data dari Sekretaris Kalurahan
3	Data jumlah pengunjung dan pendapatan daerah	Data Badan Pusat Statistik, Data Pokdarwis
4	Struktur Organisasi Pokdarwis Nglambor Lestari	Data dari sekretaris Pokdarwis Nglambor Lestari

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya dalam pengumpulan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, pengumpulan bahan-bahan tersebut berupa data, fenomena, fakta, gejala, dan informasi yang bersifat konkrit dan sifatnya valid (sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya), dan obyektif (jelas sesuai dengan kenyataan).

##### a. Observasi

Metode yang digunakan untuk memahami latar belakang dan fungsi yang berbeda antara obyektif, interpretatif, interaktif, dan interpretatif. Observasi merupakan kegiatan yang bersifat aktif dan memiliki kegiatan atau aktivitas ilmiah empiris yang mengamati gejala atau realitas yang bersifat empiris. Teknik ini berfungsi untuk melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang telah ditemukan melalui teknik-teknik penelitian (Hasanah, 2017). Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian yakni Pantai Nglambor, Kecamatan

Tepus, Gunungkidul. Selain itu, melalui data yang berada dalam *website* resmi Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Menurut (Rachmawati, 2007) wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui terkait gagasan, pendapat, dan motivasi seseorang dalam menentukan sebuah objek. Wawancara dilakukan untuk menemukan sumber informasi yang terbaru dan sesuai dengan fakta di lapangan, untuk meminimalisir kesalahan, peneliti menggunakan alat perekam pada hasil wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber secara mendalam, baik dari pihak Pemerintahan Desa Purwodadi, Pokdarwis Nglambor Lestari. Berikut penulis menyertakan narasumber yang di wawancarai:

Tabel 1. 4 Sasaran Narasumber

No	Narasumber	Status Narasumber
1	Pemerintah Desa Purwodadi, Tepus, Gunungkidul	Lurah Desa Purwodadi (Bapak Sagiyanto)
2	Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Nglambor Lestari	Anggota Pokdarwis (Bapak Bari)
3	Masyarakat	Triyanto, Heru, Mursidi

c. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dapat dilengkapi melalui data pengambilan dokumen yang saling berkaitan dengan penelitian yakni

dokumen tentang jumlah pengunjung dan pendapatan yang berada di dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Peneliti melakukan pengambilan dokumen secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pantai Nglambor, Kalurahan Purwodadi, Kecamatan Tepus.

#### d. Studi Pustaka

Studi pustaka dapat dilakukan dengan mencari sumber melalui buku, undang-undang, dan media yang memberikan informasi terkait dengan penelitian. Data dan sumber yang dipakai oleh penulis adalah melalui jurnal terkait kolaborasi pemerintah dan masyarakat, *website* resmi Dinas Pariwisata Gunungkidul, *website* resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kemenparekraf, data induk dari Dinas Pariwisata dan data-data dari Pemerintah Purwodadi serta Pokdarwis Nglambor Lestari

### **5. Teknik Analisis Data**

Menurut (Miles dan Huberman :1992 dalam Rijali, 2019) analisis data merupakan langkah untuk mengatur dan mengklasifikasikan data menjadi lebih terstruktur, sehingga mampu memunculkan tema dan dasar untuk menyusun peneliti dalam mendapatkan informasi dalam prosedur analisis data, langkah analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulann data, mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dengan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi lapangan di Pantai Nglambor,

wawancara dengan 4 narasumber, dokumentasi peneliti, dan data-data yang diperoleh baik secara langsung dan tidak langsung oleh peneliti.

2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, dan transformasi data kasar yang berada di lapangan. Data yang telah terkumpul dari lapangan akan diolah oleh peneliti yang sesuai dengan substansi penelitian.
3. Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari berbagai penyajian data yang diperoleh. Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan data penelitian dalam bentuk narasi sehingga perlu adanya penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.
4. Penarikan kesimpulan adalah peneliti harus memahami dan mampu mencari makna atas gejala yang ada di lapangan. Pada tahap ini penulis akan menarik kesimpulan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis dari data-data yang diperoleh dan diolah.